



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2007-2008**

KAMIS, 10 APRIL 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2008**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2007-2008

KAMIS, 10 APRIL 2008

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.*

**Yang kami hormati para Wakil Ketua Dewan,
Yang kami hormati para anggota Dewan,
Dan hadirin yang berbahagia.**

Hari ini Dewan menutup Masa Persidangan III Tahun Sidang 2007-2008 yang sudah berlangsung sejak tanggal 7 Januari 2008. Mulai besok pagi, Dewan akan memasuki Masa Reses sampai dengan 11 Mei 2008. Dalam masa sidang ini, tiga fungsi konstitusional Dewan telah dilaksanakan secara efektif oleh alat-alat kelengkapan Dewan. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan telah memproses dan menetapkan pejabat-pejabat publik. Proses *fit and proper test* tersebut telah mewarnai kegiatan Dewan dalam Masa Sidang III. Pejabat-pejabat dimaksud adalah Gubernur Bank Indonesia (BI), Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Hakim Konstitusi, Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Untuk penetapan Gubernur BI, dalam proses pencalonan yang pertama, Rapat Paripurna Dewan telah mengukuhkan proses dan keputusan Komisi XI yang menolak dua calon yang diajukan Presiden, yaitu Saudara Agus Martowardojo dan Saudara Raden Pardede. Selanjutnya, Presiden telah menyampaikan nama calon baru Gubernur BI. Sesuai prosedur dan Tata Tertib DPR RI, Komisi XI telah melakukan *fit and proper test* terhadap calon dan hasil seleksi ini oleh Komisi XI dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 April 2008. Rapat Paripurna telah menetapkan Prof. Dr. Boediono sebagai Calon Gubernur BI menggantikan Saudara Burhanuddin Abdullah yang akan berakhir masa tugasnya pada bulan Mei yang akan datang. Dewan mengharapkan agar Prof. Boediono sebagai Gubernur BI mampu mengatasi lonjakan tinggi inflasi dan meminimalkan dampak resesi global terhadap perekonomian Indonesia.

Untuk pencalonan Hakim Konstitusi, Anggota Bawaslu, dan Anggota LKPSK, pemrosesan telah berlangsung lancar dan telah dikukuhkan melalui keputusan Rapat Paripurna Dewan. Kepada para calon yang akan menjabat keanggotaan dalam lembaga-lembaga tersebut kami ucapkan "**Selamat Bekerja**". Khusus untuk Saudara

Prof. Mahfud MD dan Saudara Akil Muchtar, SH., yang telah dan akan menanggalkan keanggotaannya di lembaga ini, diminta tetap memegang komitmen untuk bersikap netral dan independen dalam menjalankan tugas serta senantiasa menjaga integritas dan kredibilitas. Kepada anggota-anggota Bawaslu yang sudah ditetapkan oleh Rapat Paripurna, diharapkan dapat segera dilantik oleh Presiden karena tahapan Pemilu segera akan dimulai. Dewan juga telah memproses usulan BPK RI dan Menteri Keuangan RI perihal penetapan nama Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan BPK RI tahun 2007.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang legislasi, sebelas RUU telah diselesaikan yaitu RUU tentang Pemilu Legislatif, RUU tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, RUU tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, RUU tentang Pelayaran, RUU tentang Pengelolaan Sampah, RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008.

Untuk RUU pemekaran, prosesnya masih akan berlanjut. Dewan menghendaki agar pemekaran daerah dapat mendukung penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DPR dan pemerintah sepakat RUU pemekaran akan dibahas lebih lanjut pada Masa Sidang IV. Untuk RUU bidang politik masih tersisa 2 RUU yang harus diselesaikan oleh Dewan, yaitu RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan RUU tentang Pemilu Presiden.

Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Masa Sidang III ini sedang menghimpun masukan dari masyarakat. Dalam RUU ini beberapa poin penting akan menjadi perhatian Pansus di antaranya terkait dengan kelembagaan MPR, struktur kelembagaan DPD berikut aturan-aturan kewenangan yang dimilikinya, dan kelembagaan DPRD yang mengacu kepada Pasal 18 ayat (3) UUD 1945. Terkait RUU tentang Pemilihan Presiden, Dewan dengan saksama memperhatikan berbagai pendapat masyarakat yang akan menjadi masukan bagi fraksi-fraksi dalam penyusunan DIM. Pimpinan Dewan sangat berharap RUU ini dapat diselesaikan tepat waktu, agar agenda Pemilu Presiden pada Tahun 2009 dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Dengan selesainya pembahasan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terbuka peluang bagi calon perseorangan menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana halnya dengan hak yang diberikan kepada partai politik atau gabungan partai politik. Dengan Undang-Undang ini calon perseorangan akan hadir mewarnai Pilkada dalam tahun 2008. Ini pertanda demokrasi semakin tumbuh, namun juga memerlukan tanggung jawab bersama agar pembangunan demokrasi berjalan dengan lebih baik.

Kita menyambut baik dengan telah disetujuinya RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang semula berjudul RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. RUU ini telah lama dipersiapkan, sekitar 9 tahun. *Alhamdulillah*

disetujui untuk diundangkan. Meski pembahasannya memakan waktu yang sangat panjang, namun UU ini nantinya mengusung semangat keterbukaan informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. UU ini akan berlaku tahun 2010 dengan maksud untuk memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah menyiapkan berbagai peraturan pelaksanaannya antara lain berkaitan dengan infrastruktur hukum, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, infrastruktur teknis, infrastruktur kelembagaan, dan sangat diperlukan juga adalah sosialisasinya.

Selanjutnya, mengenai RUU Pengesahan Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana yang dilakukan dengan tujuh negara, adalah ratifikasi terhadap perjanjian yang telah dilakukan pada bulan November 2004. Dengan ratifikasi ini, dapat meningkatkan efektifitas lembaga penegak hukum masing-masing negara dalam memberantas tindak pidana transnasional yang semakin canggih. Ruang lingkupnya cukup luas, termasuk mengatur penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana, dapat melakukan pemblokiran, penyitaan, perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Kami memandang UU ini akan menjadi payung hukum bagi Indonesia dalam hal kasus-kasus pidana yang pelakunya lari ke luar negeri.

Sidang Dewan yang terhormat,

RUU yang telah diselesaikan oleh Dewan tidak hanya masalah-masalah politik, tetapi juga masalah atau bidang lain seperti ekonomi, indagbang, dan sosial. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dibentuk dengan maksud agar dapat dilakukan reformasi dalam penataan ibadah haji. Partisipasi masyarakat disertakan melalui Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh-tokoh masyarakat Islam dan organisasi kemasyarakatan Islam. Dalam RUU ini juga dibentuk Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Abadi Umat. (BPDAU). Dengan UU ini dimaksudkan adanya penjaminan keseimbangan antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dewan juga telah menyelesaikan RUU tentang Pengelolaan Sampah. Dalam RUU Pengelolaan Sampah ini diatur secara jelas tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

Beberapa hari yang lalu DPR telah menyetujui RUU Pelayaran untuk menjadi UU. RUU ini menggantikan UU Pelayaran No. 21 tahun 1992. RUU ini mengatur secara jelas empat unsur utama pelayaran, yaitu angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim. Salah satu isu sentral dan pilar dalam RUU ini adalah pemisahan secara tegas antara fungsi regulator dan operator. Dengan pemisahan tersebut akan melahirkan kelembagaan baru berupa Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai regulator sedangkan operatornya dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Satu hal yang patut kita garis bawahi adalah RUU ini mengatur tentang sistem keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan *International Ship and Port Facilities Security Code*.

Sementara itu, Dewan akan memproses lebih lanjut usul inisiatif Badan Legislatif (Baleg) tentang RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan RUU tentang Kesejahteraan Sosial yang diusulkan oleh Komisi VIII DPR RI.

Dengan selesainya sebelas RUU yang telah dibahas dalam masa sidang ini, maka sampai dengan tahun ke-4 ini, DPR dan Pemerintah dapat menyelesaikan 104 RUU dari 284 yang telah ditetapkan di dalam Program Legislasi Nasional 2004-2009.

Masih minimnya pencapaian RUU yang telah diselesaikan Dewan, memang cukup memprihatinkan. Berbagai kendala berusaha diatasi, namun hasilnya belum juga menggembirakan. Banyak materi-materi yang cukup krusial dari setiap RUU yang memerlukan pendalaman, perdebatan panjang yang dengan sendirinya menyita waktu dan energi, sebagaimana pembahasan RUU Pemilu Legislatif dan RUU bidang politik lainnya. DPR yang sekarang ini tinggal memiliki sisa waktu kurang dari 12 bulan. Masih banyak RUU yang dibahas sejak tahun 2005 belum juga memasuki pembahasan tingkat II. Tahun ini saja sebenarnya tidak kurang dari 81 RUU yang harus diselesaikan.

Upaya penguatan kinerja Dewan terutama dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan telah ditempuh melalui berbagai cara, antara lain melalui pengalokasian waktu yang lebih banyak bagi pelaksanaan fungsi legislasi dibandingkan dengan alokasi waktu untuk pembahasan APBN dan pengawasan, serta peningkatan anggaran yang disediakan untuk pembentukan RUU, mulai dari perencanaan sampai dengan pembahasannya dengan Pemerintah. Namun melihat kinerja di bidang legislasi yang masih juga belum optimal, perlu dipikirkan upaya-upaya lain untuk memperkuat pelaksanaan fungsi ini. Revisi terhadap Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang sekarang sedang berlangsung, dapat dijadikan momentum untuk memperkuat struktur dan kelembagaan DPR yang lebih berorientasi pada penguatan pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang pengawasan, Dewan telah memproses Interpelasi DPR RI terhadap Penyelesaian Kasus KLBI dan BLBI sesuai prosedur dan Tata Tertib DPR RI. Dalam jawaban atas tanggapan Anggota Dewan dan Pengusul Interpelasi, Presiden melalui Menteri Keuangan telah menjelaskan secara detail tentang cara-cara menyeluruh dalam penyelesaian kasus ini. Pemerintah konsisten melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah sebelumnya. Dalam hal ini beberapa Anggota Dewan berkehendak usul Interpelasi DPR agar ditindaklanjuti dalam bentuk Usul Pernyataan Pendapat. Usul ini akan diproses lebih lanjut melalui mekanisme dan Tata Tertib DPR. Dalam kasus KLBI dan BLBI, Pimpinan Dewan juga telah menerima usul pengajuan Hak Angket 55 Anggota Dewan tentang penyelesaian KLBI dan BLBI. Para pengusul mengatakan bahwa kasus ini telah merugikan negara lebih dari Rp 650 triliun dan hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih serius dalam penyelesaiannya. Atas usul Angket Anggota Dewan tentang KLBI dan BLBI pun, Dewan akan memproses lebih lanjut sesuai mekanisme Dewan.

Sementara itu, Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dibentuk sejak 4 September 2007 telah melaporkan tugasnya pada Rapat Paripurna akhir bulan Februari. Dalam Rapat Paripurna tersebut diputuskan untuk memperpanjang masa tugasnya agar dapat terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perpres No.14/2007.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam Masa Sidang III ini Panitia Anggaran bersama Pemerintah melakukan pembahasan yang intensif atas perubahan UU No. 45 tahun 2007 tentang APBN Tahun Anggaran 2008, yang hari ini telah memasuki Pembicaraan Tingkat II. RUU ini harus dapat diselesaikan pada akhir masa sidang ini, mengingat perkembangan perekonomian dunia yang berdampak kepada APBN 2008 yang sedang berjalan. Perubahan APBN 2008 ini utamanya berkaitan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai lebih dari US\$ 100/barrel, kenaikan harga komoditas pangan dunia, terutama beras yang terus naik mencapai lebih dari US\$700-750/ton yang merupakan level tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Resesi yang sedang melanda dunia ini pasti akan menekan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Resesi dunia ini juga mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk itu perlu penyesuaian. Penyesuaian angka-angka APBN 2008 terutama karena turunnya proyeksi *lifting* minyak dalam realisasi APBN 2007 yang tidak dapat mencapai target 0,950 MBCD. Oleh karena itulah, Dewan sangat fokus untuk melakukan pembahasan secara intensif terhadap perubahan APBN 2008, perlu dilakukan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dari APBN Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Dewan berharap dengan adanya perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2008, tekanan dan beban anggaran negara diharapkan semakin berkurang dan dapat mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

Adapun koreksi atas perubahan besaran asumsi dasar APBN 2008 yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBI-3 bulan, harga minyak (US/barel), *lifting*, serta produk domestik bruto adalah sebagaimana telah dilaporkan oleh Pimpinan Panitia Anggaran dan Pemerintah dalam acara yang kedua dari Sidang Paripurna hari ini.

Belajar dari pengalaman krisis 1997-1998, pemerintah sedang menyiapkan berbagai aturan tentang tata cara atau protokol untuk penanganan krisis ekonomi. Aturan yang akan berbentuk UU ini kiranya akan menjadi payung hukum bagi pejabat pemerintah dalam mengambil kebijakan. Krisis ekonomi memang membutuhkan tindakan cepat dan tepat, oleh karenanya Dewan masih menunggu langkah-langkah pemerintah secara konkret dalam menyiapkan peraturan yang diperlukan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kaitan dengan melonjaknya harga beberapa komoditas pangan di dalam negeri, Dewan menilai pemerintah kurang serius mengelola kebijakan di bidang perdagangan, khususnya tata niaga komoditas minyak goreng. Walaupun harga komoditas pangan cenderung naik di pasar dunia, pemerintah harus mampu menjaga stabilitas harga pangan di pasar dalam negeri dengan cara menjaga dan mengawasi distribusi dan *supply* komoditas pangan tersebut di pasar. Yang terpenting lagi adalah, sudah saatnya pemerintah memikirkan bagaimana menjaga dan mempertahankan stabilitas harga pangan, dengan terus menambah stok pangan dengan meningkatkan produksi pangan dalam negeri, baik yang dikelola oleh pemerintah melalui Perum Bulog, maupun yang dikelola oleh pihak swasta. Kebijakan ketahanan pangan memang tidak boleh dipandang enteng, karena menyangkut hajat

hidup orang banyak.

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi tekanan dan beban terhadap APBN Tahun Anggaran 2008 ini patut didukung. Dewan mengapresiasi langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dengan mengurangi anggaran belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Kebijakan penghematan anggaran belanja pemerintah pusat ini dilakukan guna menciptakan anggaran negara yang sehat. Terkait dengan masalah pelaksanaan anggaran, muncul gagasan dari Tim Peningkatan Kinerja Dewan yang masih perlu didalami lebih lanjut oleh fraksi-fraksi tentang perlunya pembentukan alat kelengkapan DPR yang baru yang akan menindaklanjuti fungsi pengawasan atas post-audit yang selama ini belum efektif dilakukan. Namun demikian, alat kelengkapan ini diharapkan tidak mengambil alih fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komisi-komisi Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Persoalan lain yang menjadi perhatian kita adalah peningkatan kebutuhan akan tenaga listrik dikaitkan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). PT Perusahaan Listrik Negara harus terus-menerus melakukan efisiensi usaha agar peningkatan konsumsi atau kebutuhan tenaga listrik dapat diantisipasi. Hasil pembahasan Pemerintah dengan DPR RI memutuskan menunda diberlakukannya insentif-disinsentif, diganti dengan program tarif multiguna yang dikenakan untuk pemakai daya di atas 6.600 VA (R3), yang berlaku di beberapa daerah. Semua ini dimaksudkan untuk menekan subsidi APBN terhadap PLN. Pemerintah menargetkan penghematan subsidi listrik sebesar Rp. 5 triliun. Kebijakan kenaikan tarif dasar listrik tentu harus didasarkan perhitungan yang rasional dan objektif yang dilakukan secara transparan, karena akan berdampak luas terhadap sektor ekonomi lain, termasuk usaha-usaha mikro, kecil dan menengah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Dewan senantiasa mengingatkan agar masing-masing institusi penegak hukum, benar-benar menjaga komitmen dan integritasnya dalam menjalankan tugas. Penangkapan jaksa senior dalam dugaan kasus suap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini, memberikan membenaran atas sinyalemen masyarakat selama ini bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung tidak jujur dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kasus ini harus ditangani secara tuntas. Langkah Kejagung dengan memberhentikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) dan Direktur Penyelidikan dari jabatannya, adalah tindakan tepat. Kita berharap langkah ini menjadi momentum untuk melakukan pembersihan di lingkungan aparat penegak hukum, demi menjaga citra lembaga kejaksaan. Dewan memberikan apresiasi dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dalam memerangi praktek korupsi.

Kita juga memberikan penghargaan kepada aparat kepolisian yang telah berhasil membongkar sindikat berskala besar perdagangan narkoba baru-baru ini, sekaligus membongkar jaringan pemalsu kartu kredit yang telah berjalan sekitar lima tahun. Terbongkarnya sindikat narkoba perlu dilanjutkan dengan pengejaran yang cukup intensif oleh aparat khususnya oleh polisi perairan karena ada indikasi bahwa

perdagangan narkoba berskala besar telah dilakukan dengan leluasa khususnya melalui jalur laut. Dalam pada itu, kejahatan terhadap pemalsuan kartu kredit menandakan bahwa tingkat kejahatan saat ini semakin canggih dalam berbagai bentuk.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kasus kematian tragis seorang ibu dan anak di kota Makassar beberapa waktu lalu dan kasus gizi buruk di NTT dan berbagai daerah, merupakan peringatan bagi kita bahwa kemiskinan di Indonesia benar-benar nyata. Selama ini kita selalu memperdebatkan masalah angka kemiskinan, tetapi belum berbuat sesuatu yang nyata untuk mengatasinya. Konstitusi kita tegas-tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan hak atas kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk memperoleh pendapatan dasar, yang menjamin mereka yang tidak mampu (anak-anak, penganggur, dan lansia) untuk dapat menopang kehidupan mereka. Oleh karenanya, Dewan meminta pemerintah untuk serius menangani masalah ini. Dewan mengingatkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kita tidak ingin menyaksikan rakyat kita, terutama balita kekurangan gizi. Pemerintah tidak perlu melakukan polemik mengenai masalah ini, yang diperlukan adalah tindakan nyata untuk mengatasinya.

Sementara itu, kita melihat bahwa langkah pemerintah dalam mengatasi flu burung selama ini tidak berjalan secara efektif, terutama di tingkat operasional. Akibatnya, kasus flu burung di Indonesia mencapai 132 bahkan 107 meninggal dunia. Untuk kasus ini, Indonesia sekarang ini menempati urutan pertama korban flu burung. Negara-negara yang lebih dulu terjangkit relatif lebih baik dalam penanganannya sehingga lebih mampu mengendalikan virus *avian influenza* (AI). Dalam hal ini, Dewan meminta kepada aparat di tingkat daerah proaktif untuk dapat mengendalikan penyebaran virus ini melalui langkah-langkah operasional dan koordinasi dengan berbagai pihak serta melakukan optimalisasi sosialisasinya kepada masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Keprihatinan lainnya yang juga perlu mendapat sorotan Dewan adalah bencana alam terutama banjir yang hingga kini masih terus melanda beberapa wilayah di Indonesia, terutama di beberapa kota di Jawa Timur, Sumatera dan Riau. Bencana banjir dimana-mana telah merendam ribuan hektar lahan sawah. Kondisi ini mengancam ketersediaan pangan nasional, yang akan menambah panjang deretan penderitaan masyarakat. Dewan meminta pemerintah pusat dan daerah dapat bertindak cepat menangani akibat-akibat yang ditimbulkan antara lain rehabilitasi infrastruktur, sarana prasarana, rumah penduduk, gedung sekolah dan fasilitas umum, dan terutama penanganan para pengungsi.

Dewan sangat terkejut dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Bareskrim Mabes Polri terhadap 21 kapal yang bermuatan ribuan meter kubik kayu dari Kalimantan Barat menuju Serawak, Malaysia. Penangkapan tidak hanya dilakukan kepada pemilik kapal tetapi juga kepada kepala dinas kehutanan Kabupaten Ketapang berikut anak buahnya. Diperkirakan negara dirugikan Rp 4,2 triliun setiap bulannya atas penyelundupan ini. Dalam kaitan ini, Dewan meminta

kasus ini dapat ditangani secara tuntas, termasuk apabila ada aparat yang memberikan kemudahan dan memfasilitasi atas penyelundupan kayu-kayu tersebut sebagai hasil pembalakan liar. Oleh karenanya, kita menunggu tindakan tegas Kapolri untuk menindak anak buahnya yang memang terbukti bersalah.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian Dewan adalah Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang sempat menuai kontroversi karena 41 Rektor PTN telah menyatakan keluar dari perhimpunan SPMB. Pemerintah akan melakukan peninjauan kembali karena sistem ini juga dikhawatirkan akan melanggar peraturan perundang-undangan. Bagi Dewan, apapun nama yang akan diambil, yang penting harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan harus murah, mudah, dan memungkinkan diakses oleh masyarakat luas melalui proses yang demokratis dan tanpa diskriminasi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Banyak masalah yang seringkali membuat kita risau atas masalah penanganan perbatasan Indonesia dengan negara lain. Penanganan perbatasan tidak terlepas dari kondisi obyektif keterbatasan sumber daya yang ada maupun secara subyektif sebagai akibat dari kelalaian atau ketidakseriusan diri kita sendiri. Dalam kasus Askar Wathaniah sebagai salah satu contoh kasus, sangat tampak bahwa penanganan masalah perbatasan tidak terlepas dari keterbatasan yang dihadapi selama ini, yaitu mengenai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di perbatasan. Untuk itu, Pimpinan Dewan memandang bahwa penanganan masalah perbatasan tidak cukup diatasi hanya melalui perspektif kemiliteran secara fisik semata, tetapi juga bagaimana dapat mendorong agar terjadi proses pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang berada di lingkungan perbatasan dari segi sosial ekonomi dan unsur-unsur lainnya, yang dapat menopang bela negara pada umumnya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kasus film "Fitna" yang dibuat oleh Anggota Parlemen Belanda, Geert Wilders, sungguh sangat mengejutkan. Film ini berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik antar umat beragama dan konflik peradaban antara dunia Islam dan barat. Potongan video dari film ini menggambarkan kekerasan diselingi kutipan ayat-ayat Al Qur'an. Dewan mendukung langkah Pemerintah melarang penayangan dan peredaran film "Fitna". Warga Indonesia yang mencoba menyebarluaskan akan diproses secara hukum, sesuai Pasal 156A KUHP tentang penodaan terhadap agama. Dewan juga menghargai langkah-langkah pencekalan terhadap anggota parlemen tersebut apabila suatu saat hendak berkunjung ke Indonesia. Dalam kaitan ini Dewan mengajak masyarakat untuk tidak emosional dalam menanggapi kasus ini. Jangan bertindak anarkhis yang dapat mengganggu ketenteraman dan merusak kerukunan antar warga masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam masalah-masalah internasional, Dewan memberikan dukungan kepada Pemerintah terhadap sikap *abstain* Indonesia terhadap Resolusi No. 1803 Dewan

Keamanan PBB atas Iran. Tidak ada alasan yang kuat untuk memberikan sanksi baru kepada Iran dalam program nuklirnya, karena Iran selama ini telah kooperatif terhadap Badan Atom Internasional/IAEA. Resolusi baru terhadap Iran dikhawatirkan dapat mengancam kemajuan penting yang telah dicapai selama ini.

Dalam kaitan dengan kawasan regional ASEAN, Dewan sangat memprihatinkan kehidupan demokrasi di Myanmar yang belum juga mengalami kemajuan. Usulan Dewan tentang penundaan penempatan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia hingga terselenggaranya pemerintahan yang lebih demokratis, hal ini sebagai bentuk keprihatinan Indonesia terhadap perkembangan demokrasi di negara tersebut.

Dalam pada itu, Dewan menyambut baik terbentuknya pemerintahan baru di Pakistan sebagai hasil pemilu yang telah berjalan secara demokratis baru-baru ini. Parlemen Pakistan telah menunjuk Yousuf Raza Gilani sebagai Perdana Menteri yang baru. Dewan mengharapkan hubungan bilateral Indonesia-Pakistan akan semakin baik.

Selanjutnya, rekonsiliasi antara kelompok HAMAS dan FATAH di Palestina, diharapkan dapat meredakan ketegangan di wilayah ini yang pada gilirannya akan memperkuat perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya. Dengan penandatanganan rekonsiliasi ini yang dituangkan dalam Deklarasi Sanaa, maka sangat memungkinkan untuk dimulainya dialog yang konstruktif bagi kepentingan Palestina secara keseluruhan.

Dalam pada itu, Dewan merasa prihatin atas kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa dalam empat pekan terakhir antara warga Tibet dengan Pasukan Keamanan China. Kerusuhan tersebut bermula dari aksi demonstrasi para bikhsu di ibukota Tibet, Lhasa. Dewan berharap kerusuhan ini dapat berakhir dan semua pihak lebih mengedepankan dialog, sehingga tidak mengganggu persiapan dan pelaksanaan Olimpiade Beijing yang akan segera digelar beberapa bulan mendatang. Berkaitan dengan langkah-langkah diplomasi keparlemenan, perlu kami informasikan bahwa dalam beberapa hari mendatang Dewan akan mengirimkan delegasinya untuk menghadiri Sidang Umum *Inter Parliamentary Union (IPU)* ke-118 di Cape Town, Afrika Selatan. Tema umum dari Sidang Umum tersebut adalah masalah kemiskinan yang akan dibahas dalam *General Debate*. Di dalam sidang *Standing Committee* akan dibahas peran parlemen dalam menjembatani upaya menjaga keamanan nasional dikaitkan dengan kebebasan individu dalam menggunakan hak-hak demokrasi yang dimiliki, peningkatan peran para wakil rakyat dalam melindungi hak-hak pekerja migran sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM, upaya pemberantasan tindak kejahatan penyelundupan manusia yang telah menjadi ancaman keamanan di berbagai belahan bumi.

Delegasi DPR RI juga telah menghadiri *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* di Auckland, Selandia Baru, yang membahas isu-isu politik, ekonomi dan sosial dalam konteks kerja sama kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, DPR RI juga menghadiri Sidang *Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC)* di Kairo, Mesir, yang membahas isu-isu internasional yang berkaitan dengan umat Islam, khususnya konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah.

Dalam rangka membina dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, delegasi muhibah DPR RI telah diberangkatkan ke Portugal. Selanjutnya, DPR RI

juga telah menerima Delegasi Parlemen Rumania, delegasi dari Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Cina, Delegasi dari *House of Democracy Assistance Commission* dari Kongres Amerika Serikat, dan *Ethnic Council of the National of Assembly of Vietnam*. Delegasi negara lain yang direncanakan akan menjadi tamu DPR RI antara lain Delegasi dari Brunei Darussalam, Delegasi Parlemen Paraguay, dan Delegasi Parlemen Uzbekistan.

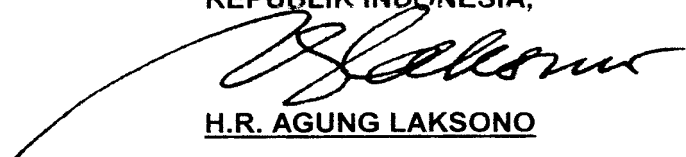
Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum kami menutup Masa Sidang ini, ada masalah yang benar-benar menjadi perhatian kita khususnya berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan para anggota Dewan. Seorang anggota Dewan telah ditangkap oleh KPK berkaitan dengan dugaan kasus korupsi pada saat yang bersangkutan belum menjadi anggota Dewan, seorang anggota lainnya tertangkap tangan oleh anggota KPK berkaitan dengan dugaan suap, dan dua anggota Dewan telah beberapa kali dipanggil KPK berkaitan dengan aliran dana BI ke DPR. Berkaitan dengan itu semua, Pimpinan Dewan mengharapkan Badan Kehormatan DPR RI dapat lebih pro aktif dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan Kode Etik DPR RI. Pimpinan Dewan menegaskan, apabila ada anggota Dewan yang terbukti melakukan tindak pidana, terutama korupsi dan menerima suap, maka Badan Kehormatan DPR RI harus menyiapkan langkah-langkah untuk menerapkan sanksi bagi yang bersangkutan. Dengan adanya kasus-kasus ini, maka Tata Cara Beracara Badan Kehormatan DPR RI yang sedang disiapkan oleh Pansus kecil yang merupakan gabungan antara Baleg dan Badan Kehormatan, harus segera diselesaikan. Dalam kaitan ini, Pimpinan Dewan menghimbau kepada seluruh anggota Dewan selaku wakil rakyat untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR RI, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta memiliki tanggung jawab kepada negara, masyarakat dan konstituennya.

Demikianlah pidato penutupan sidang ini kami sampaikan. Memasuki Masa Reses yang dimulai tanggal 11 April 2008 besok, Pimpinan Dewan mengharapkan para Anggota Dewan dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk mendengar, menampung dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi Dewan untuk mengambil kebijakan di berbagai bidang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, izinkanlah kami menutup Sidang Dewan ini dengan ucapan syukur *Alhamdulillah Robbil 'alamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**



H.R. AGUNG LAKSONO